

## BAB II

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawas dan Penempatan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu sebagian sudah melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, yang pada umumnya fokus pada tata cara penggunaan tenaga kerja asing seperti halnya RPTKA, IMTA dan Izin Tinggal. Sebagian belum sesuai perihal prinsip kolaborasi dalam pengawasan, yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawas dan Penempatan Tenaga Kerja belum melibatkan organisasi buruh dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Padahal jika dilakukan turut membantu kinerja pengawasan, mengingat jumlah pengawas tenaga kerja hanya sedikit untuk mencakup seluruh provinsi Bengkulu.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan berdasarkan data yang telah dibahas peneliti mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu, peneliti memberi saran berikut:

1. Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan ke delapan perusahaan setiap bulan perlu berkolaborasi dengan organisasi buruh regional maupun yang ada pada perusahaan untuk mempermudah dalam proses pemeriksaan. Hal ini guna mempermudah pengawasan terhadap lokasi-lokasi perusahaan yang sulit dijangkau.
2. Perlu adanya persepsi yang serupa antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu dengan Kantor Keimigrasian Kelas I mengenai orang asing yang bekerja dan berkunjung. Sebab orang asing yang bekerja harus dibuktikan dengan adanya bayaran dari perusahaan yang mengutusnya. Sementara orang asing yang berkunjung untuk melakukan *survey* juga harus dibuktikan tidak adanya bayaran dari perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Djumaldji. F.X., dan Wiwoho Soedjono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- Eko Wahyudi, dkk. 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Suparno, 2012, *Hukum Orang Asing*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Supriyanto. V., 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Husni Lalu, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Peneliitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Soedijana. F.X., 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Soedijana. F.X., dan Triyana Yohanes, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia Tinjauan Aspek Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Soedikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Stefanus Mahendra Soni, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Whiombo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visimedia, Jakarta
- Zainal Asikin dan Wira Pria, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, KENCANA, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mempergunakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599

**Jurnal:**

Hesty Hastuti, 2005, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia

Enjang Makmur, 2005, *Tenaga Kerja Asing Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi*

**Internet:**

*Dony Wijayanto*, Berlikunya Aturan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia (1), Frankiano Randang, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, dalam <http://repo.unsrat.ac.id> diakses 14 September 2017, 21:00 WIB

<http://ekonomi.kompas.com/read/2015/08/31/074800426>

<http://harianrakyatbengkulu.com>

<http://id.portalgaruda.org>

<http://yuridis.com/berlikunya-aturan-hukum-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-1>,

<http://www.bi.go.id>

<http://www.bphn.go.id/>

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id).

